

KEPENTINGAN AUSTRALIA DALAM PERJANJIAN MARITIM DENGAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE TAHUN 2018

Oleh: Mutia Hairani

mutiahairani35@gmail.com

Pembimbing: Dr. Yessi Olivia, S.IP, M.Int.Rel

Bibliografi: 18 Buku, 9 Jurnal, 1 Thesis, dan 82 Situs Web

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km.12,5 Simp.Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 07561-63277

Abstract

This research analyses Australia's decision to accept the maritime agreement with Timor-Leste in 2018. Before the agreement took place, Australia and Timor-Leste did not have a permanent maritime boundary separating them in the Timor Sea because of the different principles in determining how maritime boundaries are drawn. Australia wanted the maritime boundaries to be drawn based on the principle of the natural prolongation of the continental shelf, while Timor-Leste wanted maritime boundaries to be drawn using the median line between the two countries. In 2016, Timor-Leste submitted a compulsory non-binding conciliation to resolve maritime boundary dispute to Permanent Court of Arbitration (PCA). In this compulsory non-binding conciliation process to define maritime boundaries between them, Australia had then agreed to define maritime boundaries drawn based on the median lines. Australia's acceptance the agreement on its maritime boundaries with Timor-Leste certainly raises a question on the interests behind its decision.

This research uses the neorealism perspective that focuses on the implications of the anarchic feature of the international system to state's policy. Using foreign policy theory with rational actor model approach, this research aims to describe Australia's strategy and approach to achieve its national interest and resolve maritime disputes with Timor-Leste. The data in this research was collected through literature study.

This research shows that Australia's decision to accept the agreement to settle the maritime dispute has been driven by the economic factors; the industrialization of oil and gas from the Timor Sea is still taking place in Australia. Australia has several interests in this agreement. First, the economic benefits for Australia. Second, support for the economic development of Timor-Leste. Third, Australia's consistency in promoting the peaceful settlement of maritime disputes based on international law.

Keywords: *Maritime Boundary Dispute, Australia, Timor-Leste, Timor Sea, Timor Gap, Maritime Boundary, UNCLOS, Foreign Policy.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini meneliti bagaimana suatu negara membuat sebuah kebijakan demi mengamankan kepentingan ekonomi dan/atau kedaulatannya. Objek dari penelitian ini adalah Australia dan Timor Leste sebagai negara bertetangga yang berbatasan langsung dengan Laut Timor. Penelitian ini akan berfokus pada kepentingan Australia dalam perjanjian mengenai penetapan batas maritim permanen di Laut Timor. Secara geografis, luas Laut Timor mencapai kurang lebih 235.000 mil² (610.000 km²) yang membentang di bagian tenggara Timor Leste, Indonesia, dan bagian barat laut Australia.¹ Dengan kata lain, Laut Timor menjadi batas alami yang memisahkan Australia – Indonesia dan Australia – Timor Leste.

Untuk mengatur batas maritim negaranya, Australia dan Indonesia telah menyepakati perjanjian garis batas landas kontinen yang disebut dengan *Canberra Treaty* pada tahun 1971 dan tahun 1972.² Namun, penetapan batas maritim antara Australia dan Timor Leste di Laut Timor belum pernah dilakukan oleh kedua negara sejak Timor Leste merdeka pada tahun 2002.

Gambar 1. Peta Laut Timor



Sumber: www.marbdy.com

Batas maritim permanen yang tidak ditetapkan antara Australia dan Timor Leste menyebabkan terjadinya sengketa teritorial,

¹Encyclopaedia Britannica, "Timor Sea", diakses pada 29 September 2019 melalui <https://www.britannica.com/place/Timor-Sea>.

²Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Perbatasan Maritim RI – Australia*, 6 Februari 2019, <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/perbatasan.pdf>.

di mana masing-masing negara mengajukan klaim nya atas hak berdaulat di Laut Timor. Australia sejak awal mengklaim luas wilayahnya hingga Palung Timor (*Timor Trough*), dengan alasan bahwa Palung Timor merupakan patahan landas kontinen negaranya. Secara geografis, Palung Timor berjarak lebih dekat ke Timor Leste (40 mil) dibandingkan ke Australia (250 mil).³ Klaim Australia ini tidak pernah disetujui oleh Pemerintah Kolonial Timor Portugis (*Portuguese Timor*) yang pada saat itu berkuasa di Timor Leste (dulu Timor Timur) karena pemerintah Portugal berpendirian bahwa batas dasar laut antara Timor Leste dan Australia harus ditentukan dengan menggunakan garis tengah (*median line*) untuk membagi kedua wilayah tersebut.⁴

Bagian dari Laut Timor yang dipersengketakan oleh Australia dan Timor Leste disebut dengan Celah Timor (*Timor Gap*). Kawasan ini diketahui menyimpan potensi yang besar dalam sektor minyak dan gas, di mana salah satu ladang terbesarnya yaitu *Greater Sunrise* diperkirakan memiliki sumber daya migas sebesar 5,1 triliun kaki kubik gas dan 226 juta barel kondensat yang diprediksi bernilai hingga USD 50 milyar.⁵

KERANGKA TEORI

a. Perspektif: Neorealisme

Kaum neorealis beranggapan bahwa struktur internasional bersifat anarki, yaitu kondisi tanpa pemerintah yang lebih tinggi dari negara. Struktur ini memaksa negara untuk bertindak agresif dalam meningkatkan keamanan dan pertahanan negaranya karena tidak ada jaminan bahwa negara lain tidak

³Hong Tao Nguyen, *Strategic Review by SGPP Indonesia*, "Timor-Leste and Australia: A rocky maritime marriage". <http://sr.sgpp.ac.id/post/timor-leste-and-australia-a-rocky-maritime-marriage>. 28 Oktober 2019,

⁴Ferdy Tanoni, *Skandal Laut Timor "Sebuah Barter Politik-Ekonomi Canberra-Jakarta"*, (Kupang: Yayasan Peduli Timor Barat, 2008), hal. 2.

⁵Craig Guthrie, *Petroleum Economist*, "The Great Game for the Greater Sunrise". 28 Oktober 2019, <https://www.petroleum-economist.com/articles/politics-economics/asia-pacific/2019/the-great-game-for-greater-sunrise>.

akan menyerang, sehingga kondisi menjadi semakin anarkis.⁶

Negara cenderung merasa terancam oleh potensi serangan dari negara lain, karena tidaknya adanya pemerintahan otoritas di atas negara yang harus ditaati. Karena itulah setiap negara harus memiliki kapabilitas untuk memastikan kelangsungan dan kedaulatan negaranya. Menurut Kenneth Waltz, akumulasi kekuatan sangat penting bagi sebuah negara untuk mempertahankan wilayah, meningkatkan kemakmuran, serta menjaga warga negaranya, karena dalam struktur internasional yang anarkis, ancaman dapat muncul setiap saat, maka dibutuhkan peningkatan akumulasi kekuatan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga pertahanan negaranya.⁷

b. Tingkat Analisis: Negara-Bangsa

Tingkat analisis ini menekankan bahwa setiap tindakan yang terjadi di dunia yang diakibatkan oleh suatu keputusan pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang mengatasnamakan negara, atau dengan kata lain negara merupakan satu-satunya subjek internasional. Situasi yang dihadapi negara lain menjadi salah satu dasar tindakan bagi suatu negara untuk dapat bertahan hidup ataupun dalam upaya meningkatkan interaksi dengan negara lain.⁸ Menurut Miriam Budiardjo, negara diartikan sebagai integrasi kekuatan politik, organisasi kekuasaan, alat dari yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia di dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan di dalam masyarakat.⁹

c. Teori Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri dibuat oleh suatu negara yang diarahkan pada pemerintah luar negeri dan aktor internasional lainnya, hal ini ditujukan untuk memperoleh kontrol atau pengaruh terhadap tindakan aktor internasional yang berada di luar kedaulatan mereka.¹⁰

Penulis menggunakan pendekatan model aktor rasional (*rational actor model*) untuk menganalisis kebijakan luar negeri yang dikeluarkan Australia terkait batas maritimnya dengan Timor Leste. Aktor yang dikatakan rasional di dalam pendekatan ini adalah rezim atau kepemimpinan yang bertindak mempromosikan dan melindungi kepentingan nasional suatu negara. Pendekatan ini memandang bahwa keputusan yang diambil oleh pemimpin negara sebagai keputusan negara. Pada dasarnya, semua negara membuat keputusan yang sama untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Negara akan memilih keputusan yang paling menguntungkan negaranya dalam merumuskan kebijakan luar negeri.¹¹

d. Konsep Kepentingan Nasional

Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional yang digunakan oleh Donald E. Nuchterlain. Nuchterlain mengemukakan kepentingan nasional sebagai kebutuhan dan keinginan yang dimiliki oleh suatu negara berdaulat dalam hubungannya dengan negara lain yang merupakan lingkungan eksternalnya. Kepentingan nasional inilah yang memberikan kontribusi yang besar bagi pandangan pandangan keluar bagi suatu bangsa.

Kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Australia dalam perjanjian maritim dengan Timor Leste ialah kepentingan ekonomi di mana Australia

⁶Ken Booth, *Security in Anarchy: Utopian Realism in Theory and Practice*. International Affairs (Royal Institute of International Affairs, 1994) hal. 50-55

⁷Kenneth Waltz, *Theory of International Politics* (California: Addison-Wesley Publishing Company, 1979), hal 195-195.

⁸Miriam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1990), hal. 91.

⁹Ibid.

¹⁰Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations* (New York: Oxford University Inc., 2013), hal. 439.

¹¹Laura Neack, *The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era, 2nd Ed.*, (United States of America: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2008), hal. 31-34.

tetap ini mendapatkan manfaat ekonomi dari eksploitasi ladang minyak dan gas di Laut Timor walaupun walaupun Timor Leste menginginkan batas permanen antara kedua negara ditarik berdasarkan *median line* (garis tengah) yang akan menyebabkan sebagian besar ladang minyak dan gas masuk ke wilayah Timor Leste.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Sengketa Maritim antara Australia dan Timor Leste serta Penyelesaian Sengketa Maritim Melalui UNCLOS

Setiap negara pada umumnya memiliki perbatasan yang memisahkan bagian yurisdiksi negaranya dengan negara lainnya. Australia dan Timor Leste adalah negara yang bertetangga dan dipisahkan oleh Laut Timor.

Australia dan Timor Leste merupakan sebuah negara pantai. Berdasarkan pasal 57 UNCLOS dan Pasal 77 UNCLOS, Australia dan Timor Leste dapat mengklaim hak wilayah mereka.^{12 13} Australia mengklaim batas wilayah ZEE sejauh 200 mil dan hak landas kontinen hingga ke Palung Timor (*Timor Trough*) yang terletak sekitar 250-300 mil di lepas pantai Australia.¹⁴ Di sisi lain, Timor Leste juga mengklaim batas wilayah ZEE sejauh 200 mil ditambah batas landas kontinen sejauh 200 mil dari titik terdekat garis pangkal. Namun, hak wilayah yang diklaim oleh Australia dan Timor Leste ini tumpang tindih karena jarak kedua negara hanya membentang kurang dari 400 mil.¹⁵

Dalam kasus sengketa maritim antara Australia dan Timor Leste, penyelesaian

dilakukan pada saat Timor Leste mengajukan *compulsory non-binding conciliation* di bawah Bagian 2 dari Lampiran V UNCLOS pada tahun 2016.

Arti Penting Kawasan Laut Timor bagi Australia dan Timor Leste

Wilayah perairan Laut Timor khususnya kawasan Celah Timor yang dipersengketakan oleh Australia dan Timor Leste diketahui memiliki potensi sumber daya minyak dan gas yang berlimpah. Terdapat struktur geologi yang dikenal sebagai struktur *Kelp*, di mana struktur ini merupakan yang terbesar dari jenisnya di dunia.¹⁶ Dengan potensi sumber daya alam seperti ini, tentu Australia dan Timor Leste sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Laut Timor memiliki kepentingan ekonomi terhadap wilayah ini.

Eksplorasi minyak dan gas di Laut Timor telah dimulai sejak periode Pemerintahan Kolonial Portugis dari tahun 1500-an hingga tahun 1975. Eksplorasi sumber minyak lepas pantai pertama dilakukan pada tahun 1893 di Laclubar, Manatuto dengan ekspor yang masih berskala kecil.¹⁷ Australia melakukan eksplorasi minyak lepas pantai di kawasan Laut Timor pertama kali pada tahun 1956 oleh perusahaan *Timor Oil Ltd.*, pada tahun 1970-1972 beberapa perusahaan perminyakan Australia melakukan eksplorasi di lepas pantai bagian selatan Timor Timur.¹⁸

Australia telah menjadikan Laut Timor sebagai fokus eksplorasi minyak dan gas sejak tahun 1960-an.¹⁹ Australia melalui beberapa perjanjian maritim terkait Laut Timor yang telah disepakatinya, telah menerima banyak keuntungan ekonomi dari wilayah ini.

Keuntungan ekonomi yang diperoleh Australia dari hasil eksploitasi minyak dan

¹²United Nations, "United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)", Pasal 57. 4 April 2020, https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

¹³Ibid, Pasal 77.

¹⁴Paul Cleary, *Shakedown: Australia's Grab for Timor Oil*, (Australia: Allen & Unwin, 2007), hal. 42-43.

¹⁵Democratic Republic of Timor Leste, *Maritime Boundaries of the Territory of the Democratic Republic of Timor Leste*, Law No. 7/2002, Bagian 7 dan 8, <http://mj.gov.tl/jornal/lawsTL/RDTL-Law/RDTL-Laws/Law-2002-07.pdf> 4 April 2020.

¹⁶Sasha Stepan, *Credibility Gap: Australia and Timor Gap Treaty*, (Australia: Australian Council for Overseas Aid, 1990), hal. 2.

¹⁷La'o Hamutuk, "Chronology of Oil and Gas Developments in the Timor Sea", the La'o Hamutuk Bulletin, Vol. 3, No. 8, December 2002, hal. 8-10.

¹⁸Ibid.

¹⁹Paul Cleary, *Shakedown: Australia's Grab for Timor Oil*, Op.Cit., hal. 4.

gas di Laut Timor berbanding terbalik dengan apa yang didapat oleh Timor Leste. Timor Leste hanya menerima 18,1% dari hasil eksploitasi keseluruhan ladang *Greater Sunrise* berdasarkan *Sunrise IUA* tahun 2003.²⁰ Timor Leste sangat membutuhkan akses ke sumber daya minyak dan gas di Laut Timor untuk menjadikan negaranya mandiri secara ekonomi karena ekonomi Timor Leste sangat bergantung pada cadangan minyak dan gas di Laut Timor.²¹

Rangkaian Perjanjian Maritim di Laut Timor

Negara-negara di sekitar Laut Timor beberapa kali menyepakati perjanjian maritim yang mengatur batas wilayah, eksplorasi, serta eksploitasi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Australia dan Indonesia memulai negosiasi perbatasan di Laut Timor pada tahun 1970. Negosiasi ini menghasilkan perjanjian mengenai garis batas landas kontinen yang disebut dengan *Canberra Treaty* pada tanggal 18 Mei 1971.²²

Canberra Treaty hanya meliputi perbatasan antara Indonesia dan Australia di Laut Timor dan tidak melibatkan wilayah perairan Timor Leste (saat itu Timor Timur). Pemerintah Kolonial Portugis yang pada saat itu berkuasa di Timor Timur menolak untuk terlibat dalam perjanjian karena menganggap kesepakatan yang didasari batas landas kontinen ini akan lebih menguntungkan Australia. Hal ini menyebabkan terbentuk suatu area khusus yang kemudian disebut dengan Celah Timor (*Timor Gap*).²³

Indonesia menjadikan Timor Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia pada tahun 1976, Indonesia dan Australia kembali menegosiasikan kesepakatan yang ditujukan untuk mengatur kawasan Celah Timor. Hasil dari negosiasi ini adalah penandatanganan *Timor Gap Treaty* pada tahun 1989, di mana kesepakatan ini menentukan *Zone of Cooperation* (ZOC) atau zona kerja sama di bagian utara *median line* antara Timor Timur dan Australia. Perjanjian ini mulai berlaku pada tahun 1991.²⁴

Timor Timur merdeka pada 20 Mei 2002 dan menjadi Republik Demokratik Timor Leste (Timor Leste). Di hari yang sama, Australia dan Timor Leste menyepakati *Timor Sea Treaty* untuk melanjutkan perjanjian sebelumnya.²⁵ Selanjutnya Australia dan Timor Leste menandatangani *Sunrise International Unitization Agreement* (Sunrise IUA), di mana perjanjian ini menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengembangan bersama dari ladang *Sunrise* dan *Troubadour*, yang kemudian dikenal dengan ladang *Greater Sunrise*.²⁶

Pada tahun 2006, Australia dan Timor Leste menandatangani *Treaty between Australia and Timor Leste on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea* (CMATS). Perjanjian ini mengatur tentang pengembangan dan bagi hasil setara dari eksploitasi ladang *Greater Sunrise* dengan rasio pembagian produksi 50:50.²⁷ Selain itu, Perjanjian CMATS juga memberlakukan moratorium atau penundaan penetapan batas maritim permanen serta proses yang berkaitan dengan batas maritim selama 50

²⁰ *National Interest Analysis, "Agreement between the Government of Australia and the Government of the Democratic Republic of Timor Leste Relating to the Unitisation of the Sunrise and Troubadour Fields, Done at Dili on 6 March 2003"*, <https://www.laohamutuk.org/OilWeb/Sunrise/IUA/timorlestenia.pdf>, 4 April 2020.

²¹ Kathryn Khamsi, "A Settlement to the Timor Sea Dispute?", *Harvard Asia Quarterly*, Vol. IX, No. 4, Fall 2005. <https://www.laohamutuk.org/OilWeb/Boundary/KhamsiHAQ.htm>, 4 Juli 2020.

²² Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Perbatasan Maritim RI – Australia*, Op.Cit.

²³ La'o Hamutuk, "Chronology of Oil and Gas Developments in the Timor Sea", Op. Cit.

²⁴ Ibid.

²⁵ *Timor Sea Treaty between The Government of East Timor and The Government of Australia*, <https://www.laohamutuk.org/OilWeb/TSTreaty/TST%20text.htm>, 6 September 2019.

²⁶ *Agreement Relating to the Unitisation of the Sunrise and Troubadour Fields*, https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House_of_Representatives_Committees?url=jsc/mayjune2003/report/chap4.pdf, 23 Maret 2020.

²⁷ *Treaty between Australia and Timor Leste on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea* (CMATS). 5 Februari 2019, <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/treaty-maritime-arrangements-australia-timor-leste.pdf>.

tahun atau lima tahun setelah eksploitasi ladang gas *Greater Sunrise* berhenti.²⁸

Penyelesaian Sengketa Perbatasan Maritim antara Australia dan Timor Leste di laut Timor

Pemerintah Timor Leste secara resmi memberi tahu Australia bahwa mereka melaksanakan haknya untuk arbitrase berdasarkan Lampiran B pada *Timor Sea Treaty*, dengan alasan utama bahwa CMATS tidak sah karena Australia melakukan spionase pada tahun 2004 dan tidak menegosiasikan perjanjian tersebut dengan itikad baik.²⁹

Pengadilan arbitrase CMATS diproses di bawah *Permanent Court of Arbitration* (PCA) di Den Haag, Belanda. Namun, pengadilan arbitrase ini telah ditangguhkan oleh persetujuan kedua pemerintah setelah pertemuan dengan Komisi Konsiliasi pada Oktober 2016.³⁰ CMATS resmi dihentikan sepenuhnya pada tanggal 10 April 2017. Dengan pembatalan CMATS, pengaturan tentang *Greater Sunrise* sekarang kembali ke *Timor Sea Treaty* 2002 dan *Sunrise IUA* 2003.³¹

Timor Leste mengumumkan pada bulan April 2016 bahwa ia memulai proses *compulsory conciliation* atau konsiliasi wajib terhadap Australia berdasarkan Bagian

2 Lampiran V UNCLOS untuk menetapkan batas maritim permanen antara kedua negara. Dengan persetujuan negara yang terlibat, *Permanent Court of Arbitration* (yang merupakan badan administratif daripada pengadilan) bertindak sebagai *Registry* dalam proses ini.³² Proses *compulsory conciliation* diikuti lima orang panel yang terdiri dari dua orang perwakilan Timor Leste, dua orang perwakilan Australia, dan satu orang pilihan dari kedua belah pihak. Lima orang panel ini disebut dengan *Conciliation Commission* atau Komisi Konsiliasi. Proses konsiliasi ini berjalan dengan lancar. Berdasarkan siaran pers dari PCA pada 15 Oktober 2017, putaran pembicaraan di Den Haag yang berlangsung pada 9-13 Oktober telah mencapai kesepakatan tentang teks lengkap rancangan perjanjian dalam *Comprehensive Package Agreement* atau Perjanjian Paket Komprehensif 30 Agustus 2017 (Perjanjian 30 Agustus).³³

Komisi menyelenggarakan pertemuan terakhir pada 19 Februari 2018 dengan perwakilan dari Australia, Timor Leste, dan *Greater Sunrise Joint Venture*. Para pihak telah mencapai kesepakatan tentang perjanjian yang membatasi batas maritim antara Australia dan Timor Leste di Laut Timor, selain itu juga membahas mengenai status hukum ladang gas *Greater Sunrise*, pembentukan Rezim Khusus untuk *Greater Sunrise*, dan jalur untuk pengembangan sumber daya. Setelah menyelesaikan proses domestik masing-masing, kedua pemerintah telah sepakat bertemu pada tanggal 6 Maret 2018 di New York untuk penandatanganan Perjanjian Batas Maritim mereka.³⁴

²⁸Question & Answer, *In the matter of the Treaty between the Government of Australia and the Government of the Democratic Republic of Timor Leste on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea*. 27 Maret 2020, https://www.laohamutuk.org/OilWeb/Sunrise/CMA/TS/CMATS_QA_JJSmith.pdf.

²⁹La'o Hamutuk, "2012-2016: Protesting the Australia-Timor-Leste CMATS Treaty to compel boundary negotiations". <https://www.laohamutuk.org/Oil/Boundary/CMAT/STindex.htm>, 4 Juli 2020.

³⁰Permanent Court of Arbitration, "Joint Statement by the Governments of Timor Leste and Australia and the Conciliation Commission Constitutes Pursuant to Annex V of the United Nations Convention on the Law of the Sea". 19 Juli 2020, <https://pcacases.com/web/sendAttach/2053>

³¹Bec Strating, *The Interpreter*, "As maritime agreement with Australia dissolves, Timor Leste left exposed". <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/maritime-agreement-australia-dissolves-timor-leste-left-exposed>, 21 Juli 2020.

³²Hao Duy Phan, "The Precedent-Setting Timor-Leste and Australia UNCLOS Case". 25 Agustus 2020, <https://thediplomat.com/2016/09/the-precedent-setting-timor-leste-and-australia-unclos-case/>.

³³Permanent Court of Arbitration, "Press Release: Conciliations between the Democratic Republic of Timor Leste and the Commonwealth of Australia". <https://pcacases.com/web/sendAttach/224020> Juli 2020.

³⁴Permanent Court of Arbitration, "Press Release: Conciliations between the Democratic Republic of Timor Leste and the Commonwealth of Australia",

Perjanjian Penetapan Batas-batas Maritim Permanen di Laut Timor

Timor-Leste dan Australia menandatangani Perjanjian Batas Maritim yang disebut *Treaty between Australia and the Democratic Republic of Timor Leste Establishing Their Maritime Boundaries in the Timor Sea* pada tanggal 6 Maret 2018. Upacara penandatanganan yang berlangsung pada pukul 17:00 di Markas Besar PBB di New York merupakan puncak dari proses *compulsory conciliation* antara Timor-Leste dan Australia yang dilakukan oleh Komisi Konsiliasi sesuai dengan UNCLOS dan di bawah naungan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) di Den Haag, Belanda. Penandatanganan Perjanjian Batas Maritim ini diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal PBB, H.E. Antonio Guterres, yang menyaksikan tanda tangan perjanjian tersebut bersama dengan Ketua Komisi Konsiliasi, H.E. Duta Besar Peter Taksø-Jensen serta anggota Komisi Konsiliasi, Dr. Rosalie Balkin, Hakim Abdul G. Koroma, Profesor Donald McRae, dan Hakim Rüdiger Wolfrum.³⁵

Perjanjian ini terdiri dari sejumlah elemen yang terkait erat yang merupakan bagian dari keseluruhan kesepakatan, termasuk: 1) perjanjian menetapkan batas-batas maritim permanen antara Australia dan Timor Leste di Laut Timor, 2) perjanjian mengakui hak kedaulatan kedua negara dan menciptakan Rezim Khusus *Greater Sunrise* untuk pengembangan bersama, eksploitasi serta pengelolaan ladang gas *Greater Sunrise*, 3) perjanjian ini mencakup pengaturan transisi untuk memberikan kepastian dan kesinambungan peraturan bagi investor yang terkena dampak di sektor minyak dan gas di Laut Timor. Seperti dalam negosiasi apa pun, kedua belah pihak membuat kompromi. Perjanjian ini

<https://pcacases.com/web/sendAttach/229520> Juli 2020.

³⁵Permanent Court of Arbitration, "Press Release: Conciliations between the Democratic Republic of Timor Leste and the Commonwealth of Australia", <https://pcacases.com/web/sendAttach/230320> Juli 2020.

menjelaskan bahwa hasilnya mewakili akomodasi bersama yang tanpa mengurangi posisi hukum kedua belah pihak. Kedua belah pihak dan Komisi menganggap itu adalah hasil yang adil dan seimbang.³⁶

Perjanjian Maritim tahun 2018 ini diratifikasi pada pertukaran nota diplomatik saat Perdana Menteri Australia mengunjungi Timor Leste pada 30 Agustus 2019 dalam rangka memperingati 20 tahun referendum Timor Leste. 42 orang Parlemen memilih mendukung ratifikasi perjanjian ini.³⁷

Analisis Kepentingan Australia dalam Perjanjian Maritim Tahun 2018

Pemerintah Australia pada awalnya mengkritik langkah Timor Leste saat mengajukan *compulsory conciliation* ke PCA, dengan mengatakan bahwa tidak ada diskusi lebih lanjut mengenai penetapan batas maritim permanen.³⁸ Namun, Australia tidak punya pilihan lain selain tunduk pada prosedur karena proses konsiliasi wajib dilakukan dan diikuti oleh negara-negara anggota UNCLOS.³⁹ Namun, sebagai salah satu pihak yang juga terlibat dalam proses konsiliasi, Australia tentu memiliki kepentingan lain saat penetapan batas maritim permanen tersebut. Kepentingan Australia antara lain: 1) Manfaat ekonomi bagi Australia, di mana batas-batas maritim permanen yang ditetapkan pada Perjanjian

³⁶Department of Foreign Affairs and Trade, "Australia and Timor Leste Maritime Boundaries". 24 Juli 2020, <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/australia-maritime-boundary-fact-sheet.pdf>.

³⁷Oki Raimundos, *The Diplomat*, "Timor-Leste Parliament Approves Sea Border Treaty with Australia", 25 Juli 2020. <https://thediplomat.com/2019/07/timor-leste-parliament-approves-sea-border-treaty-with-australia/>.

³⁸La'o Hamutuk, "2016-2020: Compulsory Conciliation leads to a Maritime Boundary Treaty between Australia and Timor Leste". 20 Juli 2020, <https://www.laohamutuk.org/Oil/Boundary/18ConciliTreaty.htm>.

³⁹Anne-Marie Schleich, "The Historic 2018 Maritime Boundary Treaty between Timor-Leste and Australia", ISPSW Strategic Series: Focus on Defense and International Security, Issue No. 573, 2018, hal. 3.

Maritim tahun 2018 diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi kedua pihak dan memungkinkan pengembangan sumber daya alam yang berkelanjutan di Laut Timor dengan memberikan kepastian dan stabilitas bagi perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Laut Timor.⁴⁰ 2) Dukungan bagi perkembangan ekonomi Timor Leste, di mana Penetapan batas maritim permanen antara Australia dan Timor Leste berdampak besar terhadap kemajuan ekonomi Timor Leste di masa depan. NIA berpendapat bahwa Timor-Leste yang stabil dan makmur adalah kepentingan nasional Australia hal didukung dengan fakta bahwa Australia adalah mitra terbesar Timor Leste dalam pembangunan dan keamanan.⁴¹ 3) Konsistensi Australia untuk mendukung penyelesaian sengketa maritim secara damai, di mana Australia diketahui sebagai negara yang mendukung penyelesaian sengketa maritim secara damai. Hal ini dapat dilihat dari sikap Australia pada saat kasus Tiongkok dan Filipina di Laut Tiongkok Selatan (LTS) pada tahun 2016, di mana Tiongkok menolak keputusan PCA yang menyatakan bahwa klaim Tiongkok di LTS melanggar UNCLOS. Australia melalui Menteri Luar Negerinya, Julie Bishop, menyatakan bahwa seharusnya Tiongkok dapat menghormati putusan PCA tersebut dan mematuhi. Selain itu, Bishop juga mengatakan bahwa keputusan PCA tersebut mengikat secara hukum dan Australia berharap semua pihak yang terlibat dapat mengambil kesempatan ini untuk bernegosiasi secara damai, berdasarkan hak-hak maritim kedua pihak yang sudah jelas dan membawa klaim mereka sejalan dengan hukum internasional.⁴² Sesuai dengan

pernyataannya, Australia berusaha untuk tetap konsisten terkait penyelesaian sengketa maritim secara damai dan menyelesaikan sengketa maritim dengan Timor Leste. Hal ini dapat dilihat dari usaha Australia dalam mendiskusikan kesepakatan yang menguntungkan bagi negaranya dan juga Timor Leste.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada pembahasan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisa data. Australia pada awalnya menginginkan batas maritim ditarik berdasarkan batas landas kontinen negara, namun pada perjanjian maritim yang disepakati pada tahun 2018, batas maritim ditarik berdasarkan garis tengah antara Australia dan Timor Leste. Selain itu, Australia sejak awal kemerdekaan Timor Leste cukup pasif dalam negosiasi terkait penetapan batas maritim, hal ini dikarenakan lebih fokus pada negosiasi mengenai pengaturan sumber daya minyak dan gas yang terkandung di Laut Timor.

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan dengan menggunakan teori kebijakan luar negeri dan konsep kepentingan nasional, Australia sepakat untuk menetapkan batas maritim permanen di Laut Timor untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Menggunakan pendekatan model aktor rasional, Australia memperhitungkan keuntungan yang akan diperoleh negaranya dalam penetapan batas maritim permanen dengan Timor Leste. Kebijakan Australia dipengaruhi oleh faktor ekonomi, di mana Australia ingin mengamankan haknya dalam eksploitasi minyak dan gas di Laut Timor. Australia berusaha mempertahankan kepentingan nasionalnya di Laut Timor tetap tercapai walaupun batas maritim permanen dengan Timor Leste ditarik berdasarkan *median line* (garis tengah) yang menyebabkan sebagian besar ladang minyak dan gas masuk ke dalam teitorial Timor Leste. Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya tersebut, Australia dan Timor Leste sepakat untuk berbagi pendapatan hulu dari ladang *Greater*

⁴⁰Parliament of Australia, "4. Timor Treaty-Maritime Boundaries", 27 Juli 2020.

https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Treaties/ScienceTechnicalBrazil/Report_180/section?id=committees%2Freportjnt%2F024178%2F26096.

⁴¹Ibid.

⁴²ABC AM, "Interview with Kim Landers", diakses pada 29 Juli 2020 melalui <https://www.laohamutuk.org/Oil/Boundary/2016/ABCJulieBishop13Jul2016.pdf>.

Sunrise, di mana rasio 30 persen untuk Australia dan 70 persen untuk Timor-Leste jika ladang *Greater Sunrise* dikembangkan melalui jalur pipa ke pabrik pemrosesan LNG di Timor Leste, dan rasio 20 persen untuk Australia dan 80 persen untuk Timor Leste jika ladang *Greater Sunrise* dikembangkan melalui jalur pipa ke pabrik pemrosesan LNG di Australia. Dilihat dari pendekatan neorealisme, kawasan Laut Timor dengan potensi ekonomi yang melimpah dapat membantu Australia untuk meningkatkan akumulasi kekuatan negaranya.

Maka dapat disimpulkan bahwa Australia memiliki kepentingan dalam perjanjian maritim tahun 2018 tersebut. Penetapan batas maritim permanen antara Australia dan Timor Leste di Laut Timor dilakukan atas hasil dari proses *compulsory non-binding conciliation* yang dilakukan pada tahun 2016-2017. Meskipun penetapan batas maritim permanen yang dilakukan oleh Australia atas dasar menerima keputusan hasil konsultasi dengan Timor Leste dan Komisi Konsultasi di bawah PCA, Australia tentu memiliki kepentingan lain di dalamnya. Hal ini dikarenakan, negosiasi dilakukan berdasarkan keputusan dari para pihak yang terlibat. Kepentingan Australia meliputi kepentingan ekonomi bagi negaranya, dukungan ekonomi bagi Timor Leste, serta konsistensi Australia untuk mendukung penyelesaian sengketa maritim secara damai.

REFERENSI

Buku:

- Tanoni, Ferdy. *Skandal Laut Timor "Sebuah Barter Politik-Ekonomi Canberra-Jakarta"*. Kupang: Yayasan Peduli Timor Barat, 2008.
- Booth, Ken. *Security in Anarchy: Utopian Realism in Theory and Practice. International Affairs*. Royal Institute of International Affairs, 1994.
- Waltz, Kenneth. *Theory of International Politics*. California: Addison-Wesley Publishing Company, 1979.

Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.

Jackson, Robert dan Georg Sorensen. *"Introduction to International Relations"*. New York: Oxford University Inc., 2013.

Neack, Laura. *The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era, 2nd Edition*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers Inc., 2008.

Cleary, Paul. *Shakedown: Australia's Grab for Timor Oil*. Australia: Allen & Unwin, 2007.

Stepan, Sasha. *Credibility Gap: Australia and Timor Gap Treaty*. Australia: Australian Council for Overseas Aid, 1990.

Jurnal:

La'o Hamutuk. "Chronology of Oil and Gas Developments in the Timor Sea". *the La'o Hamutuk Bulletin*, Vol. 3, No. 8, (December 2002).

Khamsi, Kathryn. "A Settlement to the Timor Sea Dispute?". *Harvard Asia Quarterly*, Vol. IX, No. 4, (Fall, 2005): 6-23.

Schleich, Anne-Marie. "The Historic 2018 Maritime Boundary Treaty between Timor-Leste and Australia", *ISPSW Strategic Series: Focus on Defense and International Security*, Issue No. 573, (2018): 1-9.

Internet:

Encyclopaedia Britannica, "Timor Sea", 29 September 2019.
<https://www.britannica.com/place/Timor-Sea>.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Perbatasan Maritim RI – Australia*, 6 Februari 2019.
<https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/perbatasan.pdf>.

Hong Tao Nguyen, *Strategic Review by SGPP Indonesia, "Timor-Leste and Australia: A rocky maritime marriage"*, 28 Oktober 2019.

- <http://sr.sgpp.ac.id/post/timor-leste-and-australia-a-rocky-maritime-marriage>.
- Craig Guthrie, *Petroleum Economist*, "The Great Game for the Greater Sunrise", 28 Oktober 2019. <https://www.petroleum-economist.com/articles/politics-economics/asia-pacific/2019/the-great-game-for-greater-sunrise>.
- United Nations, "United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)", https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf. 4 April 2020.
- Democratic Republic of Timor Leste, *Maritime Boundaries of the Territory of the Democratic Republic of Timor Leste*, Law No. 7/2002, Bagian 7 dan 8, <http://mj.gov.tl/jornal/lawsTL/RDTL-Law/RDTL-Laws/Law-2002-07.pdf>. 4 April 2020.
- National Interest Analysis, "Agreement between the Government of Australia and the Government of the Democratic Republic of Timor Leste Relating to the Unitisation of the Sunrise and Troubadour Fields, Done at Dili on 6 March 2003", <https://www.laohamutuk.org/OilWeb/Sunrise/IUA/timorlestenia.pdf>. 4 April 2020.
- Timor Sea Treaty between The Government of East Timor and The Government of Australia, <https://www.laohamutuk.org/OilWeb/TSTreaty/TST%20text.htm>. 6 September 2019.
- Agreement Relating to the Unitisation of the Sunrise and Troubadour Fields, https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House_of_Representatives_Committees?url=jsct/mayjune2003/report/chap4.pdf, 23 Maret 2020.
- Treaty between Australia and Timor Leste on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea (CMATS), 5 Februari 2019. <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/treaty-maritime-arrangements-australia-timor-leste.pdf>.
- Question & Answer, *In the matter of the Treaty between the Government of Australia and the Government of the Democratic Republic of Timor Leste on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea*, 27 Maret 2020. https://www.laohamutuk.org/OilWeb/Sunrise/CMATS/CMATS_QA_JJ_Smith.pdf.
- La'o Hamutuk, "2012-2016: Protesting the Australia-Timor-Leste CMATS Treaty to compel boundary negotiations", 4 Juli 2020. <https://www.laohamutuk.org/Oil/Boundary/CMATSindex.htm>.
- Permanent Court of Arbitration, "Joint Statement by the Governments of Timor Leste and Australia and the Conciliation Commission Constitutes Pursuant to Annex V of the United Nations Convention on the Law of the Sea", 19 Juli 2020. <https://pcacases.com/web/sendAttachment/2049>.
- Bec Strating, *The Interpreter*, "As maritime agreement with Australia dissolves, Timor Leste left exposed", 21 Juli 2020. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/maritime-agreement-australia-dissolves-timor-leste-left-exposed>.
- Hao Duy Phan, "The Precedent-Setting Timor-Leste and Australia UNCLOS Case". 25 Agustus 2020. <https://thediplomat.com/2016/09/the-precedent-setting-timor-leste-and-australia-unclos-case/>.
- Permanent Court of Arbitration, "Press Release: Conciliations between the Democratic Republic of Timor-Leste and the Commonwealth of Australia", 20 Juli 2020. <https://pcacases.com/web/sendAttachment/2240>.
- Permanent Court of Arbitration, "Press Release: Conciliations between the Democratic Republic of Timor-

- Leste and the Commonwealth of Australia*", 20 Juli 2020.
<https://pcacases.com/web/sendAttachment/2295>.
- Permanent Court of Arbitration, "Press Release: Conciliations between the Democratic Republic of Timor-Leste and the Commonwealth of Australia", 20 Juli 2020.
<https://pcacases.com/web/sendAttachment/2303>.
- Department of Foreign Affairs and Trade, "Australia and Timor Leste Maritime Boundaries", 24 Juli 2020.
<https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/aus-timor-maritime-boundary-fact-sheet.pdf>.
- Oki Raimundos, *The Diplomat*, "Timor-Leste Parliament Approves Sea Border Treaty with Australia", 25 Juli 2020.
<https://thediplomat.com/2019/07/timor-leste-parliament-approves-sea-border-treaty-with-australia/>.
- La'o Hamutuk, "2016-2020: Compulsory Conciliation leads to a Maritime Boundary Treaty between Australia and Timor Leste", 20 Juli 2020.
<https://www.laohamutuk.org/Oil/Boundary/18ConcilTreaty.htm>.
- Parliament of Australia, "4. Timor Treaty-Maritime Boundaries", 27 Juli 2020.
https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Treaties/ScienceTechnicalBrazil/Report_180/section?id=committees%2Freportjnt%2F024178%2F26096.
- ABC AM, "Interview with Kim Landers", 29 Juli 2020.
<https://www.laohamutuk.org/Oil/Boundary/2016/ABCJulieBishop13Jul2016.pdf>.